KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Percepat penanggulangan bencana Sumatera, komisi V minta Basarnas Cs fleksibel gunakan anggaran
Tanggal : Minggu, 07 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Percepat Penanggulangan Bencana Sumatera

Komisi V Minta Basarnas Cs Fleksibel Gunakan Anggaran

Komisi V DPR mengambil langkah strategis dengan membebaskan kementerian mitra komisinya mengatur anggaran internalnya secara fleksibel. Hal ini demi kepentingan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Sumatera.


FOTO TEDY RM

Lasarus

KETUA Komisi V DPR Lasarus mengatakan, kebijakan ini diambil agar birokrasi tidak menghambat proses mitigasi dan penyelamatan di lapangan. "Kementerian-kementerian itu boleh mengutak-atik anggaran tersebut asalkan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujar Lasarus dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Diketahui, mitra Komisi V DPR terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Mereka bisa menggunakan dana internal untuk melakukan perputaran anggaran antar Direktorat Jenderal (Dirjen) atau antar deputi di kementerian atau lembaga terkait tanpa harus melalu persetujuan DPR.

Lasarus melanjutkan, hal itu dilakukan demi mempermudah birokrasi agar mitigasi bencana dilakukan secara cepat. Anggaran bukanlah masalah dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Sebab masih ada anggaran berkode BA 99 atau dana darurat di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 400 triliun. "Ini belum digunakan," ungkap dia.

Diketahui, BA 99 merupakan kode mata anggaran darurat di luar perencanaan rutin yang disediakan Pemerintah Indonesia untuk penanganan bencana alam atau kondisi luar biasa mendesak, seperti banjir besar di Sumatra.

Lasarus mengatakan, penetapan status bencana nasional atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Pempus). Sebab ini menyangkut indikator teknis dan subjektivitas Pemerintah.

Namun, status bencana nasional perlu ditetapkan jika dampak bencana semakin meluas, banyak korban, dan Pemerintah kewalahan menangani bencana tersebut. Bahkan, sampai hari ini masih ada beberapa titik yang belum bisa terbuka.

"Saya kemarin dihubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton, di sana masih ada kurang lebih 11 desa yang masih belum bisa diakses," sebut politikus PDIP ini.

Namun, ia melihat, Pempus saat ini masih merasa mampu menangani bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera sehingga tidak naik status menjadi bencana nasional. "Mari kita lihat, Komisi V DPR akan tetap akan melakukan pengawasan secara ketat," tandasnya.

Komisi V DPR, kata Lasarus, akan meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (10/12/2025) untuk meninjau kondisi wilayah-wilayah yang aksesnya terputus. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur mendesak yang akan dimasukkan dalam prioritas anggaran negara tahun depan.

"Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan Pemerintah karena sebagian besar masih di sana," kata dia.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, Pemerintah perlu menggunakan momentum bencana banjir dan longsor di Sumatera untuk menindak pengusaha yang hanya mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) tetapi abai terhadap dampak lingkungan dan sosial.

"Kami menyayangkan sikap apatis para pelaku usaha besar yang dinilai tutup mata terhadap penderitaan korban bencana," keluh Firman dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025)

Padahal, bencana tersebut berkaitan erat dengan kerusakan ekosistem hutan yang menjadi lahan bisnis mereka. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen penegakan hukum melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Instrumen ini bisa bekerja efektif untuk mencabut izin perusahaan nakal.

"Pemerintah harus bertindak tegas. Evaluasi menyeluruh dan pencabutan izin diperlukan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat," tegas politikus Golkar ini. ■ TIF